

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN

Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UPY
iin.rosalia@yahoo.com
Tri Siwi Nugrahani
Fakultas Ekonomi UPY
tri siwinugrahani@yahoo.com
Sri Rejeki
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UPY
umi.cici.66@gmail.com

Abstrak

Dalam menghadapi globalisasi diperlukan komitmen bersama, untuk bersatu dengan semangat solidaritas dan membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multi dimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek sosial, budaya juga ekonomi. Perempuan desa khususnya masih banyak yang tidak berdaya. Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk Merumuskan strategi Penentasan Kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi partisipasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Subyek penelitian ini pejabat di SKPD Pemda Kabupaten Sleman (Bappeda, Nakersos , BKBP, Dinas Lingkungan Hidup) ,serta Kasie Kesmas Kecamatan Turi, Kepala Desa Donokerto, Kepala Dusun , tokoh masyarakat dan kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pemberdayaan perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat meningkatkan memberi motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyadaran lingkungan hidup , kelompok mampu mengembangkan deversifikasi olahan pangan berbahan dasar lokal.

Pengentasan kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan ini dapat membawa perubahan kelompok perempuan menjadi termotivasi untuk berkembang untuk mendapatkan penghasilan. Dengan pemberdayaan perempuan desa mampu mengembangkan potensinya untuk membentuk usaha ekonomi produktif berbasis lokal sehingga dapat membentuk kemandirian masyarakat,dengan demikian melalui pemberdayaan perempuan desa dapat mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan ,desa,pemberdayaan dan perempuan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah global, yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Sebagian orang mungkin memahami

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari sisi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah. Persoalan kemiskinan ini selalu menyertai proses pembangunan yang dilakukan oleh masing-

masing negara. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi problem besar yang harus diselesaikan. Berbagai langkah-langkah kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah dirumuskan berdasarkan berbagai konsep yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang masing-masing. Namun demikian, gejala kemiskinan masih menunjukkan sosok yang nyata.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan nomor 23 dari 33 provinsi termiskin di Indonesia, yaitu mencapai 16,5% 5,5% lebih tinggi dibandingkan dengan data nasional (11%), yang melebihi angka rerata pada tingkat nasional. Kondisi ini sangat ironis karena DIY memiliki indeks kesejahteraan masyarakat yang tertinggi di tingkat nasional dan indeks pembangunan masyarakat nomor empat. Sementara kemiskinan di Kabupaten Sleman sebagai obyek evaluasi angka kemiskinan mencapai 18% pada tahun 2011. Sementara itu pada tahun 2012 Berdasarkan SK Bupati Sleman No 295/Kep.KDH/A/2012 tanggal 1 Agustus 2012 di Kabupaten Sleman masih terdapat KK miskin sebanyak 49.471 KK atau 15,85 % dari 312.089 KK. (Hempri 2013)

Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 peta kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat diketahui melalui data tentang jumlah Kepala Keluarga Miskin di tingkat Kecamatan, berikut kami sajikan data tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga Miskin Th 2012

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	KK Miskin	%
1. Moyudan	11.037	1.864	16,89
2. Minggir	10.697	2.642	24,70
3. Seyegan	13.652	3.559	26,07
4. Godean	19.658	2.680	13,63
5. Gamping	26.601	3.209	12,06
6. Mlati	27.351	3.113	11,38
7. Depok	38.025	1.451	3,82
8. Berbah	14.649	2.313	15,79
9. Prambanan	16.147	3.132	19,40
10. Kalasan	23.795	3.519	14,79

11. Ngemplak	16.234	2.396	14,76
12. Ngaglik	26.581	2.340	8,80
13. Sleman	20.107	5.010	24,92
14. Tempel	15.941	4.435	27,82
15. Turi	11.094	2.158	19,45
16. Pakem	10.890	1.078	9,90
17. Cangkringan	9.630	4.572	47,78
Jumlah	312.089	49.471	15,85

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam BPS Kab.Sleman:2013

Dari tabel 1 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar **49.471 KK (15,85%)**, dan tampak pula bahwa tiga kecamatan yang digunakan sebagai sampel penelitian tahun 2014 cukup tinggi tingkat kemiskinannya yaitu Kecamatan Ngemplak **2.396 KK (14,76%)**, Kecamatan Turi **2.158 KK (19,45 %)**, dan Kecamatan Cangkringan **4.572 KK (47,78 %)**. Untuk Kecamatan terbesar tingkat kemiskinannya adalah di Kecamatan Cangkringan. Hal ini sangat dapat dimengerti, mengingat untuk Kecamatan Cangkringan merupakan daerah yang paling parah terkena dampak erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2010. Apabila dilihat berdasar keluarga yang tidak miskin dapat Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Keluarga Keluarga Tidak Miskin 2012

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	KK Tidak Miskin	%
1. Moyudan	11.037	9.173	83,11
2. Minggir	10.697	8.055	75,30
3. Seyegan	13.652	10.093	73,93
4. Godean	19.658	16.978	86,37
5. Gamping	26.601	23.392	87,94
6. Mlati	27.351	24.238	88,62
7. Depok	38.025	36.574	96,18
8. Berbah	14.649	12.336	84,21
9. Prambanan	16.147	13.015	80,60
10. Kalasan	23.795	20.276	85,21
11. Ngemplak	16.234	13.838	85,24
12. Ngaglik	26.581	24.241	91,20
13. Sleman	20.107	15.097	75,08

14. Tempel	15.941	11.506	72,18
15. Turi	11.094	8.936	80,55
16. Pakem	10.890	9.812	90,10
17. Cangkringan	9.630	5.058	52,52
Jumlah	312.089	262.618	84,15

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam BPS Kab.Sleman :2013

Pada 2014 dari data yang di peroleh dari Bappeda Kabupaten Sleman telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman . Jumlah KK Miskin untuk seluruh Kabupaten Sleman ada sebesar **45.037 KK (13, 89%)** , dan untuk Kecamatan Ngemplak berjumlah **1.697 KK (9,59%)**, Kecamatan Turi **2147 KK (19,91%)**, dan Kecamatan Cangkringan **2046 KK (21,42 %)** . Untuk Kecamatan Cangkringan ada penurunan yang sangat besar dari 47,78% menjadi 21,42% penurunan angka ini dapat dimungkinkan karena adanya berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun non pemerintah , baik dari dalam maupun luar negeri yang membantu pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana erupsi Merapi. Namun secara keseluruhan untuk tingkat Kabupaten penurunan angka kemiskinan tidak besar yaitu dari 15,85% menjadi 13,89 %. Rendahnya penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengkaji lebih lanjut program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai instansi di Kabupaten Sleman.

Kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Krisis dimensional seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini ekonomi, politik dan sosial, bencana alam, banjir, dan lain-lain, sehingga membuat harga kebutuhan pangan seperti harga beras dan kebutuhan pokok lainnya naik, juga kesulitan air bersih dan lain-lain membuat perempuanlah yang memikul beban paling berat. Oleh karena itu memperhatikan masalah perempuan sangatlah penting, karena antara kualitas ibu rumah tangga dan kualitas keluarga saling berhubungan. Hal ini dapat dipahami, bahwa jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah

tangga rendah, maka akan berpengaruh pada kualitas keluarga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi reproduksi. Bagaimana caranya melaksanakan peran dengan baik, jika dirinya sendiri sebagai perempuan masih rapuh atau rentan.

Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian memberdayakan perempuan dalam rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Dalam menghadapi globalisasi diperlukan komitmen bersama, untuk bersatu dengan semangat solidaritas dan membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan. Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan masyarakat miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan melalui pendekatan humanistik, pendekatan ekonomi produktif dan penyadaran lingkungan hidup. Pengalaman melaksanakan Pengabdian Masyarakat melalui Hibah PPM IbM tahun 2009 (Indriyati, dkk., 2009) pemberdayaan perempuan melalui partisipasi aktif sasaran , menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan perempuan dan keluarganya. (Indriyati dan Nugrahani, 2013). Dari uraian tersebut diatas rumusan masalahnya adalah “Bagaimana proses pemberdayaan perempuan agar dapat mengentaskan kemiskinan di desa ?”

2. TUJUAN

- a. Merumuskan strategi Penentasan Kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan
- b. Memberikan masukan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan

3. KAJIAN LITERATUR

A. Gambaran Umum Kemiskinan

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari UU No 40/2004 tersebut terlihat bahwa upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, juga harus melihat potensi yang dimiliki di wilayah sekitar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apabila sudah mengetahui potensi wilayah tersebut, maka akan mampu mengetahui pula daya saing atau keunggulan dari wilayah tersebut, sehingga masyarakat di sekitar wilayah tersebut akan merasa sejahtera karena masyarakat mampu memiliki penghasilan yang cukup atau tidak dikatakan miskin.

Terdapat dua macam kemiskinan, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (*relative and absolute poverty*). Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar kelompok pendapatan, oleh karenanya selalu dinamis. Hakikat kemiskinan ini tidak dilihat dari indikator-indikator ekonomi, namun menyangkut aneka dimensi sosial.

Masalah kemiskinan dapat dikatakan multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki

arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini. (Hempri 2013)

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Mengingat persoalan struktural dan multidimensi tersebut, maka upaya penanggulangan seyogyanya diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan kan menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak (Keppi Sukesi, 2009:1).

Selanjutnya salah satu rekomendasinya hasil penelitiannya adalah model penanggulangan kemiskinan partisipatif yaitu yang berasal masyarakat terutama perempuan miskin dan tokoh masyarakat adalah alternatif yang perlu diuji coba. Model ini dimulai dari kegiatan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perempuan miskin, perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip adil, partisipatif, dan berorientasi pemecahan masalah, kelembagaan terpadu dan monitoring serta evaluasi periodik dan berkelanjutan (Keppi Sukesi, 2009).

B. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan masalah kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk memotong mata rantai penyebab-penyebab kemiskinan. (Soetomo, 2006) menjelaskan faktor-faktor

yang diidentifikasi membentuk jaringan kemiskinan diantaranya adalah kelemahan fisik, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Faktor apa yang harus memperoleh prioritas atau pemotongan mata rantai penyebab kemiskinan harus dimulai dari mana, sangat tergantung pada kondisi masyarakat dan kawasan yang bersangkutan. Upaya pemotongan salah satu mata rantai tersebut akan efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan apabila memiliki dampak berantai terhadap faktor-faktor lain yang terkait dengan jaringan kemiskinan tadi. Dalam hal program-program yang ditujukan secara langsung untuk menangani masalah kemiskinan dalam jangka panjang mungkin tidak efektif apabila program tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan sosial dan politik. (Hempri, 2013)

Pengarusutamaan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat ini muncul mengingat kegagalan program-program pembangunan masyarakat di masa lalu. Belajar dari pembangunan masa lalu, banyak program pembangunan yang manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada lapisan paling bawah. Salah satu penyebabnya adalah program tersebut kurang relevan dengan persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena dalam perumusan dan penentuan program, masyarakat pada tingkat terbawah tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi, kepentingan dan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dalam program. Kondisi ini merupakan pemborosan energi dan sumber daya pembangunan di samping manfaat pembangunan menjadi tidak tepat sasaran karena tidak dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat yang seharusnya lebih diprioritaskan (Soetomo, 2011). Melalui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan ini secara baik diharapkan persoalan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat dapat diatasi.

C. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok berdaya, istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada

intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak dasarnya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Lahir dan berkembangnya konsep *empowerment* memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep *empowerment* itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk *empowerment* akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep *empowerment* tersebut tidak disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau *power*, orang yang tidak berdaya dapat berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan disini berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi dari solusi yang ditentukan. Proses ini pernah dilakukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah PPM IbM tahun 2009, di Parangtritis Bantul, yang hasilnya bahwa dengan metode partisipasi aktif, perempuan Kelompok perempuan pesisir setelah mendapatkan tambahan pelatihan, dan pendampingan pelaksanaan hibah PPM 2009 ini adalah perempuan pesisir menjadi mandiri dalam hal ekonomi dan sosial, dan dapat ikut mengembangkan lingkungan sosialnya. Dengan meningkatnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya., yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan (Indriyati, dkk, 2009).

Hasil penelitian PSW UGM tahun 2006, merumuskan bahwa pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Selanjutnya dalam satu salah rekomendasi penelitiannya menyebutkan bahwa perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai implementasi Inpres no 9 tahun 2000 (Tim PSW UGM, 2006 : 70).

Dengan menerapkan model pendekatan pemberdayaan perempuan desa melalui pendekatan sosiokultural, ekonomi dan lingkungan hidup dapat diharapkan perempuan miskin mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan , dan dengan pendekatan kultural dapat diketahui faktor –faktor budaya yang mendukung perubahan. Pendekatan ekonomi ini diharapkan perempuan dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha ekonomi produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan pendekatan lingkungan perempuan diharapkan mampu menjaga

kelestarian lingkungannya melalui penyadaran untuk masa depan generasi penerusnya.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui program-program pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya pengentasan kemiskinan juga harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan tersebut.

4. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

B. Teknik Pemilihan Sumber Data

Dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa lembaga saja sebagai unit analisis, yang dirasa dapat mewakili proses pelayanan bagi program pengentasan kemiskinan khususnya yang menggunakan metode pemberdayaan perempuan seperti yang terangkum dibawah ini :

- 1) Bappeda Sleman, sebagai informan dari lembaga ini adalah pejabat struktural yang terkait. Informasi dari pejabat ini sangat penting untuk menggali berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan penanganan kemiskinan, serta berbagai kebutuhan data sekunder lainnya, seperti peraturan-peraturan pemerintah daerah, administrasi, finansial/dukungan pendanaan, termasuk mencari

informasi tentang lembaga-lembaga mana saja yang ikut serta dalam program pengentasan kemiskinan.

- 2) Pejabat struktural Kecamatan Turi yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dan PLKB informasi ini diperlukan karena sebagai pelaksana langsung program pengentasan kemiskinan di wilayahnya.
- 3) Satu kelompok perempuan miskin Dusun Kemiri Gading Kulon, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, informasi dari kelompok ini penting untuk mengetahui kebutuhan riil perempuan dan model pemberdayaan yang tepat.

C. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara mendalam (*depth interview*) Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauhmana efektifitas program penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan menggali informasi mengenai pengalaman-pengalaman informan dalam menangani persoalan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, serta dinamika jaringan kerjasama antar instansi dalam menangani program pengentasan kemiskinan. Dalam pengumpulan data melalui metode *depth interview* ini menggunakan instrument berupa *interview guide* guna memudahkan dan memberikan petunjuk dalam rangka pengumpulan data.
- 2) Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung atas segala yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, teknik ini sebagai alat untuk melengkapi teknik lainnya.

- 3) *Focus grup discussion (FGD)* yang diikuti oleh SKPD dan instansi terkait dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa sasaran penelitian serta kelompok perempuan sasaran program pengentasan kemiskinan.. Kegiatan FGD dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. FGD dilakukan kepada para penerima manfaat program pengentasan kemiskinan

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulana data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, samapai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun proses analisis dalam penelitian ini dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan kemudian direduksi yaitu data yang ada disaring melalui pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Kemudian dalam analisis penyajian data berupa sajian naratif dari data yang dimiliki dari berbagai informasi tersebut akan digabungkan agar tersusun dalam bentuk terpadu dan mudah dipahami, kemudian dibuat deskripsi, dan dilihat tendensi-tendensinya, kemudian dibuat interpretasi, yang selanjutnya hasil interpretasi tersebut apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, lalu ditempatkan sebagai

kesimpulan hasil penelitian program pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Pengetasan Kemiskinan

Kabupaten Sleman SKPD Dinas

Nakersos program yang berjalan adalah:

- a) Program RASKIN
Alokasi bulan Mei tahun 2015, ada 60485 RTS-PM dengan harga Rp. 1.600/kg dengan total untuk 17 Kecamatan dan 86 Desa, 1212 dusun, Setiap bulannya diadakan evaluasi dengan mengundang Tim Raskin (Bulog Drivre DIY, Bag, Kesra DIY, BPPM DIY, FLP, Tim Kecamatan dan TKSK)
- b) Program bantuan untuk disabilitas berat, untuk tahun 2014 ada 2,855 orang penyandang disabilitas di Sleman. Kegiatan tersebut didanai oleh APBD dan APBN,
 - 1) Untuk bantuan yang dinanai dari APBD II pada tahun 2015 yang masuk daftar SK Bupati sebanyak 110 orang, mengadakan bantuan @Rp. 3.800.000,-/tahun dibayarkan pada dua tahap, proses pencariannya langsung dari rekening masing-masing di BPD.
 - 2) Untuk bantuan yang bersumber dari APBN
- c) Program LU terlantar
Jumlah LU terlantar ada 6.245 orang, yang sudah disantuni baru 221 orang @Rp. 150.000,-
- d) Penanganan kelg Fakir Miskin sejumlah 60.485 orang dan rentan Miskin sejumlah 16.332 orang dengan program BLSM, Jamkesda, BPJS (3 Kartu Sakti)
- e) Rehabilitas Tuna Sosial (RTS)
 - 1) Bantuan OSODK (Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan) sekarang berganti dengan nama ASPDB (Asisten Sosial Penyandang Disabilitas Berat) Jumlah penerima ada 234 orang besaran @ Rp. 300.000,- untuk Panti ada 9 LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) mendapatkan bantuan @ klien Rp. 900.000,-/tahun.
 - 2) Bantuan untuk Disabilitas yang mengalami gangguan tubuhnya untuk yahun 2014 diberikan bantuan 53 orang berupa alat bantu mobilitas
 - 3) Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 - 4) Bantuan Anjal
 - 5) Bantuan Napza dengan kampung bebas narkoba.
 - 6) Penanganan Bayi terlantar, pengangkatan anak (adopsi)
 - 7) Bantuan rekomendasi kartu Jamkesda yang sudah kedaluawarsa ke BPJS
 - 8) Usaha Sosial Ekonomi Produktif/KT Pada tahun 2013 kelompok tersebut berjumlah 63 kelompok.
 - 9) Usaha sosial ekonomi produktif/LU pada tahun 2013 kelompok tersebut berjumlah 13 kelompok.
 - 10) Usaha sosial ekonomi produktif/IRT, pada tahun 2013 kelompok tersebut 131 kelompok.
 - 11) Kelompok usaha bersama (KUBE) dengan daban pada tahun 2013 sejumlah 141 kelompok
 - 12) Kelompok usaha bersama dampingan program keluarga harapan (PKH) dengan dana kementerian. Pada tahun 2008-2010 sejumlah 32 KUBE dengan besaran bantuan sebesar 20 juta untuk per kelompok
 - 13) Program ASLUT (Asisten Lanjut Usia) dana APBN untuk 440 orang bantuannya 12 bln x Rp. 200.000,- diterima selama 4 bulan.
 - 14) Program LU rentan sosial ekonomi tahun 2014 jumlah LU 250 orang bantuannya @orang 2 bln x Rp. 200,000,-
 - 15) Program plat home care dana APBD II bagi kader lansia tahun

2014 bantuannya alat alat kesehatan lokasi di Desa Kalasan

- 16) USEP/LU program Dinasos DIY bagi lansia potensial lokasi Donoharjo bantuannya Rp. 3.000.000,-/kelompok
- 17) KUBE tahun 2014 dana kementerian melalui dinas sosial DIY lokasi kec. Prambanan, desa sumberharjo ada 20 KUBE bantuannya @30 jt, Desa Wukirharjo 20 KUBE

Dari berbagai program yang dilakukan melalui SKPD Dinas Nakersos Kabupaten Sleman tampak bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sebgaiian besar adalah karitatif, belum merupakan program pemberdayaan. Bukan pengembangan usaha Selain itu dari pengamatan program tersebut juga tidak bersifat partisipatif, dan kurangnya pendampingan kelompok sasaran. Khususnya kelompok perempuan.

B. Prinsip Program Penanganan Kemiskinan (PRONANGKIS) yang sudah dicanangkan Pemda Sleman adalah 1) pemberdayaan, 2) sinergi (kesinambungan), 3) keberlanjutan, 4) pelaksanaanya enam prinsip tersebut belum optimal.

Namun dari hasil penelitian dari berbagai instansi masih ditemukan program yang tumpang tindih dalam penanganan masalah kemiskinan dalam program pengentasan kemiskinan koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program baru sebatas pemberian bantuan program kegiatan kerja sama dengan TKSK kecamatan dan kader di dusun belum maksimal.

Hasil wawancara dari berbagai instansi masih ditemukan program yang tumpang tindih dalam penanganan masalah kemiskinan dalam program pengentasan kemiskinan koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program baru sebatas pemberian bantuan program kegiatan kerja

sama dengan TKSK kecamatan dan kader di dusun belum maksimal.

Masyarakat miskin memang pernah mendapatkan dari pemerintah namun bantuan kadang tifak merata, dan sifatnya karitatif.

C. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan

1) Menentukan Sasaran Program

Dalam pengentasan kemiskinan perlu memberikan prioritas bagi KK yang masih produktif. Hal ini penting karena jika KK miskin produktif tetapi tidak diberdayakan , akan memberikan dampak negatif , seperti akan menimbulkan meningkatnya pengangguran yang akhirnya berdampak pada bertambahnya permasalahan sosial. Faktor sosial budaya yang ada di lokasi sasaran program sangat menentukan pola pemberdayaan.

2) Menggali Permasalahan

Kelompok perempuan yang menjadi subyek sasaran pengentasan diajak untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan penyadaran gender kelompok dapat merasakan pentingnya perempuan untuk bangkit meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam tahapan ini dirumuskan sebuah permasalahan yang timbul dimasyarakat seperti banyaknya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai aktivitas ekonomi produktif, karena belum mempunyai keterampilan

3) Menggali kebutuhan

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka langkah selanjutnya adalah menggali kebutuhan khususnya kebutuhan

perempuan miskin. Kebutuhan perempuan bukan hanya kebutuhan praktis semata, tetapi juga kebutuhan strategis. Proses ini dapat dilakukan melalui program penyadaran gender. Selain itu juga perlu dikaji sejauh mana program-program yang pernah dilakukan oleh berbagai instansi telah melibatkan perempuan, dan apakah program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Dalam tahapan ini kelompok diminta untuk berdiskusi untuk menggali kebutuhan perempuan. Dari hasil diskusi kemudian disimpulkan kebutuhan kelompok yang paling utama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut kelompok ini memerlukan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisi lokal dan yang hanya menggunakan peralatan sederhana.

4) **Menggali Potensi SDM dan Potensi Alam**

5) **Menentukan Bentuk Pelatihan**

Setelah mengetahui permasalahan, kebutuhan dan potensi kelompok sasaran langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan sesuai harapan kelompok. Pada tahapan ini pelatihan dilakukan sesuai dengan potensi lokal

6) **Pengembangan keterampilan berbasis lokal**

Untuk menentukan program pelatihan yang tepat sesuai harapan dan potensi kelompok, maka yang menentukan jenis keterampilan apa yang akan dilatihkan. Kelompok diminta untuk berdiskusi untuk mencari prioritas pelatihan yang sesuai dengan potensi lokal. Strategi pelatihan ini mengajak kelompok untuk berpartisipasi dalam penyediaan bahan pelatihan. Bentuk partisipasi tersebut adalah kelompok menyediakan bahan dasar yaitu salak, daun singkong. Melalui pendekatan

sosio budaya hasilnya lebih efektif, hal ini dapat terlihat bahwa sejak sosialisasi sampai dengan pelatihan terakhir partisipasi anggota sangat tinggi, dan tingkat solidaritas juga baik.

7) **Praktik Mandiri dan Pendampingan**

Untuk meningkatkan keterampilan kelompok, setiap selesai kegiatan, fasilitator memberikan pekerjaan rumah agar kelompok mencoba berlatih mengolah makanan berbasis lokal dan mencatat setiap hasilnya, dan diharapkan kelompok mampu mengembangkan hasil olahan tersebut, yang kemudian ditunjukkan pada fasilitator dalam pertemuan berikutnya.

Dengan metode tersebut ternyata dirasakan manfaatnya sangat bagus, karena kelompok merasa didampingi dalam berproses, dan merasa sangat dihargai posisinya. Melalui pelatihan pengolahan pangan lokal, menunjukkan kesadaran kelompok arti pentingnya perawatan dan pemanfaatan lingkungan.

8) **Penguatan kelompok dan Pelatihan manajemen**

Untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan kelompok perempuan, maka perlu diberikan strategi dalam penguatan kelompok. Strategi yang dilakukan adalah melibatkan tokoh perempuan desa. Pelatihan manajemen diberikan secara sederhana menyesuaikan kondisi kelompok..

9) **Monitoring**

Langkah terakhir adalah melakukan monitoring, kegiatan monitoring ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan kelompok. Selain hal tersebut dengan adanya

monitoring kelompok merasa ada perhatian, karena sangat membantu kelompok untuk termotivasi tetap ada aktifitas dan memberikan semangat untuk mempertahankan eksistensi kelompok

D. Focus Group Discussion:

Tujuan diadakan FGD ini adalah sosialisasi hasil penelitian tentang pengentasan kemiskinan kepada SKPD terkait di Kabupaten Sleman Dalam FGD ini yang diundang adalah kelompok perempuan sebagai subyek implementasi model Kelompok perempuan Ngudi Rejeki, aparat kecamatan Turi, aparat desa Donokerto, SKPD yang membidangi masalah kemiskinan dan yang terkait dengan topik penelitian yaitu : Dinas tenaga kerja dan Sosial (Nakersos) , Dinas Kesehatan, BKBPMP, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian. Dalam FGD tersebut yang menjadi nara sumber adalah Dr.Hempri Suyatna dari Universitas Gajah Mada (UGM), dan Drs. Pranama,M.Si dari Bappeda Sleman.

Hasil FGD sangat bermanfaat baik bagi peneliti maupun kelompok yang menjadi subyek implementasi model. Hasil testimoni dan hasil produk yang ditunjukkan kelompok sasaran kepada peserta FGD sangat menarik perhatian dari SKPD terkait yang hadir, maka dari Dinas Kesehatan menawarkan untuk mendaftar agar dapat diikutsertakan dalam pelatihan dan pemberian PIRT agar produk yang sudah dibuat dapat berkembang dalam pemasarannya. Sedangkan dari BKBPMP menawarkan kelompok Ngudi rejeki bisa menjadi binaannya sehingga dapat diberi subsidi bantuan modal dan pengembangan usaha. Pada dasarnya semua SKPD yang hadir memberikan apresiasi positif dalam implementasi model tersebut. Sedangkan masukan dari nara sumber selain mengkritisi implementasi model juga memberikan masukan dari hasil implementasi tersebut agar kelompok tetap dapat eksis meskipun sudah tidak

didampingi peneliti, maka perlu adanya koordinasi dengan aparat desa , kecamatan dan pemda Sleman agar diberi wadah untuk pemasaran hasil produk lokal, selain itu masukan dari nara sumber dapat melengkapi buku yang akan diterbitkan sebagai salah satu luaran dari penelitian ini.

E. PEMBAHASAN

Model pemberdayaan perempuan ini dari 13 responden mengatakan sangat sesuai dengan keinginan dan kemampuan kelompok sasaran, karena anggota kelompok diajakin untuk mengetahui permasalahannya dan diajak untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

- a) Perbedaan model program pengentasan kemiskinan pelatihan yang diberikan dengan model-model yang pernah diterima kelompok adalah, kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah/LSM yang memberikan. Ada pendapat bahwa pelatihan yang sebelumnya hanya membuat dan ditinggal pergi tanpa ada pendamping, sehingga kelompok merasakan perbedaan yang nyata, karena dirasakan oleh kelompok bahwa pelatihan model ini sangat bagus dan prospek kedepan lebih meyakinkan.
- b) Model pelatihan yang langsung praktik ternyata membawa kelompok bersemangat, apalagi kelompok diajak untuk mengatur eaktunya sendiri sesuai dengan waktu yang dimiliki, sehingga pelatihan dan pemberdayaan akan dirasakan banyak manfaatnya. Dari hasil pendampingan selama ini kelompok berkeinginan untuk mengembangkan. Oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah ataupun pihak lain yang terkait.
- c) Langkah yang tidak kalah penting adalah pendampingan dan motivasi. Agar kelompok tidak bubar dan tetap termotivasi untuk rencana bisa jalan, berkembang dan maju dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

F. KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan ini dapat membawa perubahan kelompok perempuan menjadi termotivasi untuk berkembang untuk mendapatkan penghasilan

Melalui pemberdayaan sosiokultural kelompok sasaran merasa lebih kuat dan bersemangat, karena masyarakat desa merasa bersaudara, senang bergotong royong. Metode partisipasi perempuan yang diterapkan mampu merangsang kelompok sasaran untuk aktif mengambil keputusan dan berani mencari akar masalah yang dihadapi, serta mampu menggali potensinya, sehingga mampu mencari solusi dari permasalahannya.

Pemberdayaan perempuan dengan pendekatan ekonomi merupakan realitas sosial yang sangat diharapkan masyarakat miskin. Pemberian praktik keterampilan yang menyesuaikan potensi lokal dapat mengembangkan usaha bersama ekonomi produktif kelompok perempuan, yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Pendekatan lingkungan dapat meningkatkan pemahaman pentingnya memelihara lingkungan akan menunjang kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Model pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan desa dalam upaya mengembangkan potensinya untuk membentuk usaha ekonomi produktif berbasis lokal dapat membentuk kemandirian masyarakat, model ini dapat dijadikan alternatif program pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian melalui upaya gerakan pemberdayaan perempuan desa dengan melibatkan partisipasi aktif, dapat mengurangi kemiskinan desa.

REFERENSI

- Badan Pemberdayaan Perempuan DIY, 2003 *Laporan Tim Pembangunan Berperspektif Gender*, Yogyakarta
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2013, *Panduan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2012, *Kajian Dana Bergulir Sebagai Bagian Upaya Penanggulangan Kemiskinan.*, Sleman
- Bappenas, 2005, Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
- BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2013, *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2012/2013*, BPS Kabupaten Sleman.
- BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2009, *Penduduk Kabupaten Sleman Hasil Registrasi Penduduk Pertengahan tahun 2009*, BPS Kabupaten Sleman
- Dhenov, <http://dhenov.blogspot.com/2008/02/pendekatan-sosio-kultural-dalam.html>, diunduh 26 Juni 2014
- Forum Komunikasi PSW DIY, 2000, *Laporan hasil Penelitian Evaluasi Program Daerah dan Non Sektorial*, Yogyakarta
- Handayani, Sih dan Yos Soetiyoso, 1997, *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, Sekretaris Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) kerjasama OXFAM UK/I, Yogyakarta.

- Hempri Suyatno, *Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Sleman*, 2013
- Indriyati, Nugrahani, Gunawan, Bahrum, dan Purwanti, 2009, *Laporan Ibm Kelompok Perempuan Usaha Pengolahan Makanan Hasil Laut di Pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul* (Hibah IbM Pengabdian Dikti)
- Indriyati, dan Nugrahani, 2013, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman)*, Jurnal Ilmiah PADMA SRI kreshna, Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
- Rosalia Indriyati, Tri Siwi Nugrahani, dan Sri Rejeki, *Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender*” Jurnal Penelitian Kesejahteraan , Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Keppi Sukesni, 2009, *Perempuan dan Kemiskinan Profil dan Upaya Pengentasan*, Makalah Seminar Gender dan Keadilan Sosial, Pusat Studi Kependudukan UGM kerjasama DP2M Dirjen Dikti .
- Lembaran Negara, 2004, Undang-Undang No.40, *Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*
- Sugiyono, 2012, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Peneliti PSW UGM, *Profil Gender Development Index (GDI) Dan Gender Empowerment Measure (GEM) Kabupaten Sleman*, PSW UGM Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sleman
- Tri Cahyo Wibobowo, <http://tricahyowibow.blogspot.com/2014/02/realitas-sosio-kultural.html>, diunduh tanggal 26 Juni 2014
- Tri Sakti handayani & Sugiyarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.